

PRO KONTRA MASYARAKAT TENTANG RENCANA PEMBERLAKUAN BADAN OTORITA PARIWISATA (BOP) DI KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI

Oleh: La Ode Hajratul. R, Hj. Suharty Roslan, dan Sarpin

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1).Untuk mengetahui alasan-alasan Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. 2)Untuk mengetahui Pro dan Kontra masyarakat terhadap Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Jenis metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran dengan fakta, data, dan informasi guna menjelaskan penyelesaian masalah penelitian tentang Pro Kontra masyarakat tentang rencana pemberlakuan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang memberikan penjelasan dan uraian secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Alasan ingin diberlakukannya BOP di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi tujuan untuk memperkenalkan atau mengeksploitasi sumber daya salah satunya pada sektor pariwisata agar di kenal oleh masyarakat luas terutama para wisatawan mancanegara. Namun pemanfaatannya yang belum maksimal. 2) Dalam rencana pemberlakuannya, ternyata terjadi pro dan kontra masyarakat tentang rencana masuknya BOP di Wakatobi. Pemasfaatannya hanya akan menguntungkan beberapa pihak yang bersangkutan didalam lembaga tersebut. Sehingga mengesampingkan urusan masyarakat dan kurangnya kontribusi untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pro Kontra, Masyarakat, Badan Otorita Pariwisata (BOP)

PENDAHULUAN

Wakatobi merupakan sebuah kepulauan yang berada di Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Wakatobi terkenal sebagai salah satu tujuan wisata menarik di Indonesia khususnya dari aspek wisata bahari. Nama Wakatobi adalah singkatan dari nama pulau-pulau besar yang berada disana, yakni Wangi-wangi (penduduk setempat, menyebutnya Wanci, pulau utama di Wakatobi), Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Pada zaman dahulu sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, Wakatobi terkenal sebagai tempat para pandai besi. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang.

Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dan Cooper *et.al* (1998), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi. Kegiatan wisata terdiri atas beberapa komponen utamayaitu Daerah Asal Wisatawan (DAW), Daerah Transit (DT), dan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 1996, dengan total area 1,39 juta HA, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang; yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang sangat besar sebagai daya tarik wisata, baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Namun saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan dalam perubahan guna lahan, konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, dampak kegiatan terhadap usaha konservasi, dikhawatirkan akan semakin merusak potensi sumber daya alam Wakatobi.

Jika dilihat dari kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa daerah Wakatobi dalam lima tahun terakhir (2005-2010), sektor pariwisata menempatkan diri di posisi terbesar kedua setelah perikanan dan kelautan. Akan tetapi manfaat dari perkembangan pariwisata bagi ekonomi lokal dan masyarakat setempat masih perlu ditingkatkan. Untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, beberapa rencana pembangunan telah disusun dan dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah, diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPADA) Kabupaten, serta Rencana Pengembangan Pariwisata Alam Taman Nasional Wakatobi. Demikian pula dengan program Destination Management Organisation (DMO) yang digulirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak tahun 2011, yang diharapkan dapat mensinergikan berbagai program dan kegiatan kepariwisataan lintas sektoral dan lintas para pihak di Wakatobi. Selain itu, pada tahun 2015 pemerintah pusat dibawah naungan Kemenpar yang dalam terobosannya ingin mempromosikan Wakatobi lewat rencana dibentuknya sebuah lembaga yang disebut BOP yang merupakan Badan Otorita Pariwisata. Kebijakan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi oleh Pemerintah Pusat, sangat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam membangun kabupaten. Pemerintah Pusat ingin membentuk BOP Wakatobi agar pengembangan dan pembangunan pariwisata Wakatobi lebih fokus dan terarah, kata Nadar (Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi) melalui telepon dari Wangi-wangi. Jadi kebijakan pemerintah pusat membentuk BOP Wakatobi sangat sejalan dengan visi membangun Wakatobi sehingga kebijakan tersebut mesti didukung oleh semua pihak, terutama Pemerintah Wakatobi bersama masyarakat.

Dalam terobosan pembangunan Wakatobi menjadi daerah wisata terkenal, bukan hal mudah atau tidak semudah yang di ucapkan oleh para pelopor dari BOP sendiri. BOP sendiri mendapat hadangan dari masyarakat yang tidak mendukung

akan keberadaannya dan mungkin masalah dari para elit politik yang ingin bermain dengan BOP sendiri. Badan yang siap di berlakukan ini mendapat kritikan keras dari berbagai pihak masyarakat salah satunya ketua DPR Wakatobi. Bahwa nyanyian masyarakat akan adanya deskresi yang akan terjadi dalam pembangunan ini. Dilain pihak juga ada yang mengatakan bahwa keuntungan ini hanya akan memihak kepada beberapa pihak saja. Sehingga pemanfaatan optimal untuk masyarakat sendiri dengan status ingin menikmati hasil bumi Wakatobi sendiri mulai kurang atau bisa bisa tidak lagi karena dengan terisolasi gerak masyarakat setempat akibat BOP sendiri.

Melihat fenomena di atas maka ada dua yang menjadi masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana alasan-alasan rencana Pemberlakuan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi ? Bagaimana Pro dan Kontra masyarakat terhadap rencana pemberlakuan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Dengan pertimbangan bahwasanya Kecamatan Tomia sebagai pusat pengembangan pariwisata di Wakatobi, untuk itu akan diberlakukannya Badan Otorita Pariwisata (BOP). Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka informan pada penelitian yang menjadi sumber data yaitu Masyarakat yang berada pada wilayah rencana pemberlakuan Badan Otoritas Pariwisata (BOP). Didukung oleh Lembaga Dinas Pariwisata, Anggota DPR, Pemangku Adat. Informan penelitian sebanyak 12 narasumber

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Yang dimana data kualitatif akan disajikan dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan bagaimana Pro Kontra Masyarakat Tentang Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, Sedangkan data kuantitatif adalah data-data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari para informan seperti umur, tanggal lahir, dan sebagainya.

Adapun jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah Masyarakat Nelayan, Kelompok Kerja, Dan Pemeritah Daerah yang berada di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian meliputi buku-buku, internet, journal.

Dalam pengumpulan data diperlukan kemampuan melacak sumber informasi dan keterampilan menggali data. Setiap teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebaiknya disebutkan relevansinya dengan data atau informasi yang diperlukan.

Pada pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data/informasi melalui tanya jawab secara langsung kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik ini setelah data terkumpul dilakukan analisa melalui tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengumpulan data, oleh karenanya analisa data dapat dilakukan sebelum, selama dan setelah proses pengumpulan data di lapangan.

PEMBAHASAN

Alasan Rencana Pemeberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi

Pembentukan Bop tidak membawa misi yang baru. BOP adalah upaya pengembangan pariwisata. Hanya saja Lembaga ini menarik karena target-targetnya menjadi lebih konkret dan terukur. Misalnya, penargetan jumlah kunjungan wisatawan yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini merupakan misi Kabupaten Wakatobi yang sama persis dengan tujuan dari BOP. Sehingga Pemerintah Wakatobi mengusahakan BOP bisa masuk didaerah. Persoalan pemerintah pusat, tidak berhenti pada bagaimana usaha untuk mencapai angka target fantastik. Tetapi lebih jauh bagaimana mendefinisikan kemiskinan ini dalam pembentukan BOP ini.

Terlepas dengan persoalan pemerintah pusat tentang BOP, adapun alasan dibalik rancangan pembentukan BOP di Wakatobi merupakan bagian dari:

1. Mengeksploitasi Kekayaan Sumber Daya,
2. Untuk tujuan industri pariwisata.

Kabupaten Wakatobi terkhusus Kecamatan Tomia kaya akan potensi pariwisata, akan tetapi belum dikelola secara maksimal. Upaya yang dilakukan antara lain adalah mendatangkan investor melalui pembentukan BOP. Pertumbuhan investasi diklaim mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan hidup masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Sehingga dalam terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Wakatobi dan BOP sendiri merupakan satu tujuan dalam memperkenalkan kekayaan sumber daya yang berlimpah yang ada di Wakatobi menjadi industri pariwisata yang manfaatnya bukan hanya untuk yang bersangkutan saja tetapi masyarakat utamanya.

Pro Kontra Masyarakat Tentang Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi

Adapun masyarakat yang pro terhadap keberadaan dari rencana pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) sebagai berikut, diantaranya; Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Bidang Pariwisata. Rencanapengembangan kegiatan pariwisata untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi tidak terlepas dari rencana yang saat ini telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Wakatobi dan rencana Zonasi Laut.

Melihat semua itu Wakatobi sebagai daerah wisata yang sedang berkembang saat ini tentunya mempunyai pekerjaan besar dimana sebagai salah satu dari anggota Top 10 Destinasi di Indonesia harus bisa tetap konsisten dan terus meembangkan potensi sumber daya alamnya. Untuk itu Dengan mencanangkan program baru yaitu Program peningkatan Pariwisata Lewat Lembaga pusat ialah program Badan otorita pariwisata (BOP). Yang bertujuan pelestarian, memajukan, meningkatkan, dan mengmbangkan Sektor Pariwisata Daerah.Dengan rencana masuknya program tersebut, ini di sambut baik oleh pemerintah Daerah. “Dengan program-program yang bertujuan baik untuk sumberdaya alam yang berbasis pariwisata, ini merupakan langkah pasti buat pembangunan daerah Kecamatan Tomia.Melalui perbaikan infrastrukturnya bukan hanya para wisatawan saja yang mendapatkan kenyamanan tetapi masyarakat setempat juga bisa menikmati apa yang menjadi bagian dari pembangunan ini”.

Sedangkan, masyarakat yang Kontra terhadap Badan Otorita Pariwisata (BOP). Ini mereupakan hal yang serius dan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.Pasalnya dalam perencanaan ini tidak semua masyarakat mendukung program tersebut.Persoalan diatas salah satunya berangkat dari Perpres yang beredar dimasyarakat. Adapun masalahnya sebagai berikut; Masalah Lahan, akan terjadinya Tumpang Tindih Pariwisata, Masalah Otonomi Daerah, Masalah Masyarakat Nelayan, sehingga menimbulkan persoalan Pariwisata. Kesemuanya ini yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat yang merupakan ketidakterimanya masyarakat terhadap lembaga BOP.Sehingga saat ini terjadilah pro dan kontra BOP dan masyarakat yang membuat pariwisata Wakatobi khususnya Kecamatan Tomia akibatnya terjadi tumpang tindih pada pembangunan pariwisata saat ini.Apalagi Daerah memegang status TNW (Taman Nasional Wakatobi) dan 10 Top Destinasi Indonesia.Juga saat ini mengusahakan Masuknya Badan Otorita Pariwisata (BOP). Dalam hal ini masyarakat mengharapkan yang terbaik untuk pariwisata juga kepentingan masyarakat. Demi Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi kedepannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian sebagai berikut:

1. Alasan Rencana Pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;

Semua kegiatan Pemerintah Daerah lewat percepatan pengurusan kepariwisataan merupakan alasan akan rencana pemberlakuan lembaga BOP. Yang menjadi alasan meletarbelakangi pembanguana ini ialah untuk mengeksploitasi kekayaan sumberdaya khususnya pariwisata dan menciptakan industri. Kerinduan daerah akan rencana masuknya BOP tidak lain halnya demi kemajuan pariwisata daerah tentunya. Hal inilah yang terus diperjuangkan Dinas pariwisata saat ini hingga layaknya pariwisata biasa masuk daftar daerah wisata dunia. Lewat status daerah sebagai Taman Nasional Wakatobi dan sebagai Top 10 Destinasi Di Indonesia, tentunya tidak disia-siakan pemerintah untuk terus mendorong pembangunan Pariwisata lewat rencana pemberlakuan lembaga BOP. Wakatobi begitu pula Tomia sudah rindu kehadiran BOP yang dilanjutkan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Sebab, dengan KEK, share infrastructure bisa disebut terutama jalan, air, listrik, telekomunikasi. Termasuk dermaga dan bandara, yang menjadi penentu akses dari dan ke Wakatobi, Kunci percepatan dan pengembangan destinasi itu 3A, akses, atraksi, dan amenitas.

2. Alasan Pro Kontra

Alasan Masyarakat Yang Pro

Dengan adanya rencana masuknya Lembaga BOP, akan menjadi poin tersendiri untuk pemerintah. Pasalnya dengan adanya ini akan adanya pelestarian ekosistem laut dan penanganan budaya tradisional. Untuk masyarakat sendiri pastinya akan adanya lahan mata pencaharian untuk mereka yang akan menunjang perekonomian mereka.

Alasan Masyarakat Yang Kontra

Isu masuknya lembaga tersebut menuai kontra dalam masyarakat, hingga beberapa aliansi masyarakat berbondong turun kejalan untuk menyoraki project pariwisata itu. Yang menjadi kontra dalam masyarakat ialah sebagai berikut: (1). Berangkat dari Draft PERPRES yang beredar dalam dalam masyarakat yaitu: Persoalan Lahan. Adanya pengusaan lahan oleh lembaga tersebut yang dapat mengakibatkan ruang gerak masyarakat terbatas atau di batasi. Juga pengambilan Lahan secara Cuma-Cuma demi kepentingan pembanguanan. Selain itu mengenai organisasi pengolahan atau badan pengelola yang akan membantu pembangunan, dinilai hanya akan mementingkan orang-orang penting saja yang berbau diskresi. 2. Dinamika Pemerintah Daerah Maksudnya Keterlibatan PEMDA dan BOP merupakan bagian dari rencana terbentuknya organisasi Otoriter. Sebagai contohnya kegiatan pariwisata sebelum-sebelumnya yang sebagian menguntungkan beberapa pihak dalam hasilnya. 3. Sosial Kultural juga, ini merupakan menjadi salah satu point

utama dari pemikiran masyarakat yaitu Distorsi budaya oleh budaya barat. Selain itu adanya kepentingan dengan masuknya BOP maka menarik para investor-investor yang hanya punya kepentingan usah saja dan tidak mementingkan rakyat.

Saran

Untuk itu patut diperhitungkan dan pertimbangkan kembali dengan rencana masuknya BOP di Kecamatan Tomia. Kepentingan rakyat harus menjadi bagian prioritas pembangunan. Bukan untuk mereka yang punya kepentingan didalamnya. Sepatutnya kita menginginkan masyarakat yang sejahtera bukan kisruh dalam pembangunan. Lahan, kondisi pariwisata yang berhubungan dengan pengelola sebelumnya, wilayah yang merupakan zona tangkap ini merupakan poin utama yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah. Kesejahteraan rakyatlah yang juga penting dalam pembangunan ini, bukan malah merugikan hingga menimbulkan kontra dalam pembangunan ini. Bagi peneliti selanjutnya, jika penelitian ini akan dijadikan acuan, maka disarankan agar dapat mencari referensi lebih banyak lagi, agar penelitian yang dilakukan bisa lebih mendalam. Hal ini disebabkan referensi yang penyusun dapatkan sangat terbatas, ini adalah merupakan salah satu kekurangan dari penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus.2016 *Demo Tolak Bop* . Antar sultra.com
- Arif rohman, dkk. 2002. *Sosiologi* .Klaten: Intan Pariwara.
- Asrif, Dkk. 2015. *Kerifan Lokal masyarakat Wakatobi*. Yogyakarta: Drsain; frame-aert. Frame publishing,
- Eco_Gypsy., 2014. *Founder of Wakatobi Dive Resort and The Collaborative Reef Conservation Project*. Edition 03-Indonesia Jul. 14.
- Kunaefi T.D., 2015. *Tradisi Lisan Masyarakat dalam Melindungi Alam dan Lingkungan*. Disampaikan pada Seminar Nasional “Pengembangan Green Business dan Green Technology yang Berkelanjutan” Universitas Budi Luhur, Jakarta, 21 November 2015.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian politik* s. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nadar dan Hugua Ir, i made asdhiana, dkk. 2016 *.Pembentukan Bop Wakatobi di percepat*. Kendari.Kompas.com
- Hoogueli,ankl,MM,1995. *Sosiologi Sedang Berkembang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leiper dan Cooper, Aswin Anwar. (1998,1999) *Konsep Dasar Pariwisata*.
Http//.aswinanwar.co.id
- Moleong.1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemda wakatobi, Diknas pariwisata. 2013. *Rencana pengelolaan pariwisata Wakatobi(RPP)* .website.Wakatobi